

UPAYA TRANSFORMASI KONFLIK OLEH SEARCH FOR COMMON GROUND ORGANIZATION DALAM KONFLIK DONGO (2010-2013)

Anastasia Nancy Waas¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: anastasiawaas@gmail.com¹⁾, idinfasisaka@yahoo.co.id²⁾,
prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The focus of this study is conflict transformation efforts undertaken by Search for Common Ground Organization in Dongo Conflict, Democratic Republic of Congo, from 2010 to 2013. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research shows that peace education can be a means to transform the communal conflict in a region. SFCG transform the Dongo conflict by implementing peace education through dialogue, media, and community. These efforts then opened the door for positive peace in Dongo.

Keywords: Conflict transformation, peace education, SFCG, Dongo conflict.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, konflik-konflik dalam negara (*intrastate conflicts*) muncul ke permukaan dan meningkat dengan pesat. Konflik-konflik *intrastate* ini menjadi fokus perhatian masyarakat internasional yang baru, menggeser konflik antar negara (*interstate conflicts*) seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Permasalahan baru ini menjadi salah satu sumber ancaman bagi keamanan nasional suatu negara dan bahkan mengganggu perdamaian dunia. Salah satu konflik berskala kecil namun telah meluas dan mengancam keamanan nasional adalah konflik yang terjadi di wilayah Dongo.

Dongo merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Kungu, Provinsi Equateur, Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) bagian Utara. Di wilayah ini, terdapat suatu kelompok etnis yang berkuasa dalam bidang perpolitikan, perekonomian, dan sosial sejak pemerintahan kolonial Belgia. Etnis tersebut adalah etnis Lobala. Secara jumlah, etnis Lobala juga merupakan kelompok etnis terbesar di Dongo.

Keberadaan etnis Lobala dalam perpolitikan dan perekonomian di Dongo ini mulai terancam dengan kehadiran kelompok etnis pendatang bernama etnis Boba. Semakin hari etnis ini semakin berkembang dan memiliki pengaruh dalam bidang perekonomian di Dongo. Hal itu juga membuat mereka mulai masuk dan terlibat dalam perpolitikan Dongo. Keterlibatan etnis Boba dalam perpolitikan Dongo membuat hubungannya dengan etnis Lobala menjadi semakin memanas (Sanguma, 2012).

Peta Dongo, Republik Demokratik Kongo (sfcg.com)



Awal mula konflik Dongo berasal dari perselisihan dua desa di Dongo, yaitu desa

Munzaya dan desa Enyele, mengenai kepemilikan lahan tambak ikan yang menjadi sumber mata pencaharian kedua desa. Konflik ini mulai berkembang ketika dua etnis yang saling berkompetisi di Dongo, etnis Lobala dan etnis Boba, mulai memberikan dukungannya kepada masing-masing desa. Etnis Lobala mendukung sesama etnisnya yaitu desa Enyele dan etnis Boba mendukung desa Munzaya dengan alasan rekan bisnis. Pada tahun 2009, konflik antar desa ini meluas dan berubah menjadi konflik di seluruh wilayah Dongo dengan munculnya suatu kelompok pemberontak bernama Gerakan Odjani. Gerakan Odjani terdiri dari gabungan warga Enyele, warga Dongo, dan warga dari beberapa wilayah lainnya yang berasal dari etnis Lobala. Gerakan ini mulai melakukan aksi pembantaian terhadap seluruh masyarakat non-Lobala dengan alasan ingin merebut tanah Dongo dari tangan pendatang, khususnya etnis Boba. Aksi pembantaian ini menghasilkan kurang lebih 2700 orang meninggal dan 150.000 masyarakat sipil harus diungsikan (Sanguma, 2012).

Konflik yang terjadi di wilayah Dongo ini menarik perhatian keterlibatan aktor-aktor perdamaian. Pemerintah bertindak mengirim pasukan militer nasional untuk menghentikan aksi pembantaian, kemudian pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama dengan pemerintah dan Organisasi *Search for Common Ground* (SFCG) memulai proses rekonsiliasi perdamaian bagi pihak-pihak yang berkonflik setelah kondisi wilayah aman dari konflik bersenjata. Proses rekonsiliasi ini kemudian berhasil menciptakan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik dan hal itu menandakan bahwa konflik telah berakhir secara resmi.

Berhentinya aksi kekerasan dan terciptanya kesepakatan damai antara pihak yang berkonflik di Dongo tidak menjamin kondisi wilayah dan masyarakat berada dalam situasi yang benar-benar damai. Para tokoh transformasi konflik mengemukakan bahwa hubungan konflikktual dalam masyarakat pasca konflik sangatlah besar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah transformasi konflik yaitu perubahan pandangan dari yang melihat konflik sebagai suatu peristiwa negative dan bersifat destruktif menjadi pandangan bahwa konflik adalah suatu peristiwa yang bersifat konstruktif (Miall, 2004).

Pada fase pembangunan perdamaian pasca konflik (*post-conflict peacebuilding*), upaya organisasi SFCG dalam proses perdamaian terhadap konflik Dongo tetap terus dilanjutkan. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi non profit yang memiliki misi dalam bidang transformasi konflik di RD Kongo. Berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi ini di Dongo

bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat Dongo terhadap sebuah konflik dari pendekatan permusuhan ke pendekatan yang kooperatif (sfcg.com). Namun, dalam mentransformasi konflik di Dongo membutuhkan penanganan yang tidak mudah. SFCG harus menghadapi masyarakat yang masih memiliki hubungan konflikktual yang tinggi, kekerasan struktural seperti diskriminasi, kemiskinan, korupsi, dan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih terus dialami masyarakat Dongo. Dengan demikian, SFCG harus bekerja keras untuk menjalankan misinya di wilayah Dongo. Untuk itulah penulis tertarik meneliti lebih dalam upaya yang dilakukan oleh organisasi SFCG ini, khususnya dalam menerapkan pendekatan transformasi konflik dari tahun 2010 hingga tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana upaya transformasi konflik yang dilakukan oleh *Search for Common Ground Organization* di Dongo, Republik Demokratik Kongo, tahun 2010-2013?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transformasi Konflik

Transformasi konflik adalah konsep pertama yang dipakai peneliti dalam tulisan ini. John Paul Lederach yang adalah seorang tokoh transformasi konflik mengatakan dalam artikel Michael Maise (2003) bahwa hal-hal yang dapat memperpanjang konflik dan mengakibatkan kerusakan harus diubah menjadi sesuatu yang konstruktif. Maksud dari perubahan yang konstruktif adalah mengubah cara pandang terhadap konflik menjadi positif dengan melihat bahwa konflik bermanfaat bagi suatu hubungan. Proses perubahan yang konstruktif inilah yang disebut dengan transformasi konflik (Maise, 2003).

Dalam pandangan transformasi konflik, terdapat empat dimensi perubahan yang muncul akibat sebuah konflik. Empat dimensi perubahan tersebut adalah dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi kultural (Maise, 2003).

1. Dimensi Personal

Dimensi ini menyangkut perubahan yang terjadi pada aspek kognitif, emosi, persepsi, dan spiritual akibat pengalaman konflik. Transformasi dibutuhkan untuk membebaskan individu dari efek-efek destruktif konflik sosial seperti luka fisik dan mental.

2. Dimensi Relasional

Transformasi dibutuhkan untuk memulihkan pola komunikasi dan interaksi dalam sebuah relasi yang berkonflik. Dengan lebih jelas, transformasi menunjukkan intervensi yang intens untuk mengurangi komunikasi yang buruk dan meningkatkan sifat saling pengertian.

3. Dimensi Struktural

Dimensi ini berkaitan dengan struktur sosial atau aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Dimensi ini juga menyangkut cara orang membangun dan mengelola hubungan sosial, ekonomi, dan institusional agar kebutuhan dasar manusianya terpenuhi, menyediakan akses kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka, memahami akar penyebab konflik, mempromosikan mekanisme non-kekerasan dalam menghadapi konflik, dan meminimalisasi kekerasan itu sendiri.

4. Dimensi Kultural

Dimensi budaya mengidentifikasi dan memahami pola budaya yang dapat memicu kekerasan sebagai ekspresi dari konflik. Selain itu, transformasi juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang dapat menangani konflik secara konstruktif.

Empat dimensi dalam pendekatan transformasi di atas saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis lebih dalam aktifitas-aktifitas SFCG yang menggambarkan empat dimensi transformasi konflik di atas. Upaya SFCG dalam mencapai empat dimensi tersebut dilakukan dengan tiga cara utamanya yaitu media, dialog dan komunitas (sfcg.org).

Selain itu, penting juga untuk memahami aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam transformasi konflik. Aktor-aktor tersebut antara lain negara dan organisasi antar pemerintah (*states and inter-governmental organizations*), organisasi kemanusiaan dan pembangunan (*humanitarian and development organizations*), organisasi internasional non pemerintah yang memperhatikan pencegahan dan transformasi konflik (*international non-governmental organizations, NGO*), serta pihak-pihak yang berkonflik dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (Miall, 2004, h.12). Dalam penelitian ini, peneliti hanya lebih berfokus pada transformasi konflik yang dilakukan oleh aktor NGO.

2.2 Peace Education

Dalam proses pembangunan perdamaian (*peacebuilding*), pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Kevin Kester (2010)

mengemukakan bahwa Aspek pendidikan merupakan sebuah sarana sosialisasi dan pembangunan identitas melalui transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. ini dapat memelihara budaya perdamaian bagi masyarakat yang mengalami konflik kekerasan.

United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan pendidikan perdamaian secara lengkap sebagai proses dalam mempromosikan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai hingga sampai pada perubahan perilaku yang memungkinkan anak, pemuda, dan orang dewasa melakukan pencegahan konflik dan kekerasan, memecahkan konflik dengan cara damai, dan menciptakan kondisi yang kondusif terhadap perdamaian, baik dalam diri sendiri, antar pribadi, antar kelompok masyarakat, nasional, dan bahkan internasional (Fountain, 1999). Ian Harris sendiri membagi *peace education* dalam beberapa tipe yang membantu penulis menjelaskan tipe *peace education* untuk kasus konflik kekerasan di Dongo. Dari lima tipe *peace education*, yaitu *international education*, *human right education*, *development education*, *environmental education*, dan *conflict resolution education*, penulis hanya menggunakan tiga tipe yang sesuai dengan penelitian penulis. Tiga tipe tersebut adalah *human right education*, *development education*, dan *resolution conflict education*.

a. Human Right Education

Tipe *peace education* ini mengacu pada konflik kekerasan sipil, domestik, budaya dan etnis. *Human right education* mencakup pemahaman multikultur yang bertujuan mengurangi prasangka buruk dan kebencian antar kelompok. Pendekatan terhadap *peace education* ini berfokus pada kecenderungan untuk memberikan label musuh pada orang lain dan kemudian melawan mereka. Dalam hal ini *educator* akan mengusahakan mengubah gambaran musuh dengan pemahaman warisan bersama dan menolak berbagai bentuk kekejaman yang dilakukan dalam konflik kekerasan. Tujuannya adalah menerima orang lain, menghargai kemanusiaan yang ada dalam setiap manusia dan mengadopsi sifat saling peduli terhadap orang lain yang memiliki kelompok sosial yang berbeda-beda.

b. Development Education

Peace educators menggunakan pembangunan (*development*) untuk mendidik orang yang diajar menyelesaikan kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang muncul akibat ketidakadilan oleh institusi-institusi sosial yang menggunakan hirarkinya untuk mendominasi dan menindas masyarakat. *Educators* berfokus mempromosikan orang-orang yang tertindas

untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan mengontrol pembangunan, dari pada menggunakan strategi pembangunan pemerintah yang telah dibuat oleh beberapa elit tertentu. Hal ini memotivasi masyarakat untuk berjuang melawan ketidakadilan.

c. *Conflict Resolution Education*

Conflict resolution education membantu individu dalam memahami dinamika-dinamika konflik dan menggunakan keterampilan komunikasi untuk mengelola hubungan-hubungan damai. Fokusnya terdapat pada hubungan antar pribadi dan sistem yang membantu pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan perbedaan mereka dengan dibantu oleh pihak ketiga. *Conflict resolution educators* akan mengajarkan keterampilan dalam berelasi dengan orang lain seperti cara mengelola kemarahan, pengendalian diri, kesadaran emosi, pengembangan empati, ketegasan, dan penyelesaian masalah. Dengan kata lain, *educators* akan mengajarkan keterampilan *peacemaking* kepada orang yang diajar agar mereka dapat menggunakan hal itu untuk mengelola konflik antar pibadinya, serta tidak menutup kemungkinan juga beberapa kekerasan lainnya seperti kekerasan sipil, budaya, lingkungan, dan bahkan global.

Tiga tipe *peace education* ini sangat membantu penulis dalam memposisikan program-program SFCG sesuai dengan sumber-sumber konflik yang masih berakar di Dongo. Secara lebih luas, penulis menganalisis konsep *peace education* untuk menganalisis upaya-upaya SFCG dengan cara menggabungkan tipe-tipe *peace education* dengan patokan-patokan *peace education* yang sudah dijelaskan di atas.

2.3 Perdamaian Positif

Perdamaian positif pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung (1969) dalam penelitiannya mengenai kekerasan dan perdamaian. Dirinya membagi konsep perdamaian ke dalam dua bagian, perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merupakan kondisi ketidakhadiran kekerasan, atau ketidakhadiran perang. Definisi ini muncul akibat banyak peneliti yang berfokus pada kekerasan langsung, seperti perang atau tindakan agresi lainnya pada masa perang dunia. Sedangkan Galtung (1969) sendiri melihat bahwa kekerasan juga muncul karena sebuah struktur, tidak secara langsung. Kekerasan seperti ini meliputi kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, dan segala bentuk ketidakadilan sosial lainnya yang membuat masyarakat tidak dapat mengembangkan potensinya. Kekerasan ini disebut kekerasan

struktural, yaitu kekerasan yang terjadi ketika struktur masyarakat diarahkan pada suatu tata cara yang menghambat ide-ide masyarakat itu sendiri untuk disalurkan (Nicolaidis, 2008, h.14).

Tahun 1990, Galtung (1990) memperkenalkan konsep kekerasan kultural yang muncul dari budaya sebagai simbol dari keberadaan seseorang. Kekerasan kultural adalah aspek-aspek budaya seperti identitas agama, ideologi, bahasa, seni berupa cerita-cerita, doktrin ilmu empiris, dan ilmu formal yang dapat dipakai untuk membenarkan atau mensahkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung, 1990, h. 291). Dengan demikian, keadaan tanpa adanya kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural di atas disebut Galtung sebagai perdamaian positif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai upaya transformasi konflik oleh SFCG di Dongo ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan karena penulis ingin menganalisis suatu peristiwa mengenai transformasi konflik di Dongo yang dilakukan oleh SFCG. Upaya SFCG ini akan dianalisis berdasarkan data-data tulisan yang diperoleh dari beberapa sumber kajian pustaka.

3.2 Sumber Data

Jenis sumber data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini biasanya disebut sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya melainkan dari pihak kedua (Kuncoro, 2003). Data sekunder yang dipakai penulis akan diperoleh dari beberapa sumber seperti jurnal-jurnal ilmiah mengenai transformasi konflik dan perdamaian positif, riset atau penelitian mengenai konflik Dongo, website resmi SFCG, dan sumber-sumber data resmi lainnya dari internet.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dinamika Konflik Dongo

Konflik Dongo sebenarnya berawal dari hubungan yang rusak antara dua desa yang terletak disekitar wilayah Dongo, yaitu desa Enyele dan desa Munzaya. Awalnya, kedua desa ini hidup dengan sikap saling menghargai satu sama lain. Desa Enyele sendiri merupakan sebuah desa yang terbentuk dari beberapa keluarga yang berasal dari kelompok etnis Lobala. Awalnya, seluruh warga etnis Lobala

hidup bersama di wilayah Dongo, yaitu sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman Provinsi Equateur, RD Kongo. Etnis Lobala adalah etnis terbesar di Dongo pada saat itu. Berkembangnya jumlah populasi Lobala memaksa beberapa keluarga dalam kelompok etnis ini berekspansi dan mencari lahan baru untuk menetap.

Sama halnya dengan Enyele, desa Munzaya juga merupakan hasil ekspansi dari etnis besar Bomboli. Awalnya, etnis Bomboli hidup berdampingan dengan etnis Lobala di wilayah Dongo. Namun, dalam hal jumlah, etnis Bomboli ini tidak sebesar etnis Lobala. Dalam hal kekuasaan, etnis Bomboli juga tidak seperti etnis Lobala yang memiliki pengaruh di Dongo karena hak istimewa yang diberikan pemerintah kolonial Belgia kepada etnis Lobala untuk menjadi rekan kerjanya mengontrol wilayah Dongo dalam perpolitikan, ekonomi, dan sosial (Sanguma, 2012). Kehidupan etnis Bomboli hanya seputar perburuan, dan penangkapan ikan. Berkembangnya populasi etnis Bomboli, membuat mereka juga turut berekspansi ke wilayah sekitar dengan harapan menemukan tempat yang nyaman untuk perkembangan keluarga mereka. Demi menjaga hubungan baik dengan desa Enyele secara khusus dan etnis Lobala secara umum sebagai etnis yang berkuasa pada saat itu, kepala warga etnis Bomboli yang bernama Dobula meminta kepada kepala desa Enyele yang bernama Kpoluku untuk mengizinkan etnis Bomboli membangun pemukiman dekat dengan desa Enyele mengingat pertumbuhan kedua etnis secara jumlah semakin hari pasti akan semakin meningkat.

Perjanjian kedua kepala etnis ini berhasil terbentuk dan menghasilkan kesepakatan perdamaian untuk saling melindungi dan menghormati satu dengan yang lain. Menurut perjanjian kedua belah pihak, Dobula dan kaum keluarganya diizinkan mengakses hutan untuk kegiatan bertani dan Kpoluku beserta warga desa Enyele mendapat otoritas untuk menguasai area kolam-kolam penangkapan ikan. Keduanya juga dapat menggunakan sumber daya milik pihak lain dengan syarat harus meminta ijin terlebih dahulu. Dengan terbentuknya kesepakatan perjanjian inilah, wilayah yang diminta oleh Dobula akhirnya menjadi pemukiman bagi warga Munzaya (Sanguma, 2012).

Kondisi desa Enyele dan desa Munzaya yang hidup damai sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat untuk saling menjaga dan menghargai satu sama lain berhenti sampai kedua desa berkembang secara jumlah. Meningkatnya jumlah populasi kedua desa, meningkatkan kebutuhan mereka.

Ketidaknyaman kedua desa semakin bertambah ketika masing-masing mulai melanggar kebutuhan manusianya dengan memanfaatkan sumber daya milik desa lain tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Ketika kebutuhan manusia seseorang atau sekelompok tidak ditemukan, tidak dipahami, atau tidak dihargai, maka konflik dan kekerasan bisa terjadi (Danielsen, 2005).

Pada tahun 1946, desa Enyele dan desa Munzaya mulai berkonflik memperebutkan lahan, khususnya area tambak ikan Misibo yang berlokasi di hutan Munzaya. Kedua desa sama-sama mengklaim area tambak ikan tersebut sebagai milik masing-masing desa. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan dan menghasilkan keputusan dari administrator Belgia yang berpihak pada desa Enyele. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, pengadilan dikelola oleh pemerintah Belgia yang lebih berpihak pada etnis Lobala sebagai rekan kerjanya untuk mengontrol wilayah Dongo dan sekitarnya (Sanguma, 2012). Merasa tidak adil dengan keputusan pengadilan, serta merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan desa Enyele secara resmi, desa Munzaya lebih memilih membalas dendam dengan menggunakan caranya sendiri.

Kekerasan struktural yang terjadi di antara desa Enyele dan Munzaya berupa ketidakadilan dari pengadilan semakin diperparah dengan munculnya kekerasan kultural antara kedua kelompok tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh leluhur kedua desa yaitu perjanjian Dobula dan Kpoluku mulai dikembangkan oleh masing-masing desa. Menurut desa Enyele, leluhur mereka yang mengizinkan Munzaya mendirikan pemukiman dekat dengan desa Enyele. Sedangkan menurut desa Munzaya, lahan yang ditempati mereka adalah lahan yang ditemukan sendiri oleh leluhur mereka, sehingga menuntun kedua leluhur menandatangani perjanjian perdamaian. Cerita-cerita yang tidak tertulis ini menjadi kepercayaan komunal baru bagi masing-masing desa dan semakin memicu perselisihan mengenai hak kepemilikan lahan oleh desa Enyele dan desa Munzaya.

Tahun demi tahun berbagai bentuk kekerasan, baik struktural dan juga kultural semakin berkembang hingga kekerasan langsung terjadi antara kedua desa yang berkonflik ini. Tahun 1956, salah satu warga Munzaya menembak dan membunuh hakim yang dikirim oleh pemimpin wilayah Dongo untuk melakukan investigasi konflik Enyele – Munzaya. Hal ini dikarenakan bentuk ketidakadilan yang terus dirasakan oleh warga Munzaya. Pada tahun 1973, warga desa Enyele menyerang pemukiman desa Munzaya dengan membakar beberapa rumah warga tanpa adanya reaksi dari pemerintah lokal Dongo.

Tahun 1984, warga desa Munzaya menangkap salah seorang warga Enyele yang adalah ayah dari walikota Dongo pada saat itu, yang bernama Nyaingbala, ditelanjangi, dipaksa meminum urin wanita, dan ditahan selama sepuluh hari di desa Munzaya. Kejadian ini diketahui dan dibawa ke pengadilan Gemena (ibu kota Provinsi Equateur). Kasus ini dapat diselesaikan, namun konflik antar desa mengenai sengketa lahan tidak direspon sama sekali. Tidak ada solusi apapun dari pemerintah lokal untuk kasus sengketa lahan kedua desa. Konflik sengketa lahan antara desa Enyele dan desa Munzaya tetap dibiarkan dari tahun ke tahun dan semakin berkembang hingga tahun 2000-an.

Pada tahun 2007, kasus perebutan lahan antara kedua desa mendapat perhatian dari pemimpin wilayah Dongo yang berasal dari etnis Lobala. Etnis Lobala adalah etnis warga desa Enyele, yaitu etnis yang mendominasi perpolitikan, ekonomi, dan sosial di wilayah Dongo. Pemimpin Dongo pada saat itu yang bernama Nyabotake memutuskan untuk turun tangan mempertemukan perwakilan kedua desa di desa Ngoni, sebuah wilayah netral yang terletak sekitar 23 kilometer dari Dongo. Tujuannya mempertemukan kedua pihak yang berkonflik adalah untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan yang berlarut-larut dan melakukan dialog perdamaian yang berfokus membicarakan pengembalian penggunaan dan pengaturan tambak ikan. Namun, usaha Nyabotake ini gagal karena pihak Munzaya menolak menandatangani kesepakatan perjanjian tersebut. Penolakan ini membuat Nyabotake marah dan memberi hak pada desa Enyele untuk menggunakan tambak ikan mereka yang berada di wilayah yang diklaim milik desa Munzaya.

Pada saat itu, kelompok etnis Lobala dan Boba mulai memberikan dukungan kepada masing-masing desa. Etnis Boba adalah etnis pendatang yang memiliki pengaruh dalam perekonomian Dongo. Keahlian mereka sebagai investor dan pedagang menciptakan daya saing yang kuat dengan etnis Lobala. Etnis Lobala menganggap etnis Boba adalah ancaman di wilayah milik mereka sendiri. Dukungan etnis Boba kepada desa Munzaya dengan alasan hubungan bisnis juga dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi etnis Lobala. Oleh karena itu, etnis Lobala di Dongo juga memihak pada desa Enyele sebagai desa yang berasal dari etnis yang sama.

Dukungan dua etnis besar terhadap konflik antara desa Enyele dan desa Munzaya memicu ketegangan di wilayah Dongo. Etnis Boba memiliki persepsi bahwa pemimpin-pemimpin yang berasal dari etnis Lobala tidak adil dan

tidak mampu menyelesaikan konflik antar desa tersebut. Etnis Lobala juga memiliki persepsi dan menuduh tindakan etnis Boba menciptakan hubungan bisnis dengan desa Munzaya hanya sebagai upaya meningkatkan kepentingan ekonomi mereka dan itu menjadi penyebab utama seluruh penderitaan yang terjadi. Segala bentuk prasangka buruk antara satu etnis dengan etnis yang lain ini juga termasuk bentuk kekerasan struktural yang berkembang di Dongo.

Demi menjaga kekuasaan etnis Lobala di Dongo dan juga pertahanan desa Enyele terhadap serangan desa Munzaya, desa Enyele meminta Odjani untuk membantu mereka. Odjani adalah anak seorang dukun yang berasal dari desa Liranga, Republik Kongo, namun berasal dari etnis Lobala (Sanguma, 2015). Awalnya, Odjani hanya diminta membantu desa Enyele dengan menggunakan kekuatannya mistisnya melawan desa Munzaya. Namun, tujuan awal Odjani yang hanya membantu melawan desa Munzaya berubah menjadi perluasan kekuasaan hingga ke wilayah-wilayah sekitar Dongo. Keangkuhan Odjani membuatnya merekrut anggota yang berasal dari etnis Lobala sebanyak-banyaknya dan berjuang menguasai wilayah-wilayah sekitar Dongo. Pada 22 Oktober 2009, gerakan Odjani berhasil memasuki wilayah Dongo dan mulai menyerang seluruh populasi etnis non-Lobala. Aksi pembantaian etnis yang dilakukan oleh gerakan Odjani ini menghasilkan 2700 orang meninggal dunia dan 150.000 masyarakat sipil dipindahkan ke tempat pengungsian (Sanguma, 2012).

Peran pemerintah RD Kongo sendiri baru terlihat pada saat peristiwa pembantaian etnis pada tahun 2009 terjadi. Respon pemerintah berubah ketika tahu bahwa gerakan Odjani mulai melebarkan aksinya hingga ke wilayah-wilayah sekitar Dongo, ke Gemena, Mbandaka (ibu kota Provinsi Equateur), hingga ke Kinsasha (ibu kota RD Kongo). Awalnya, pemerintah RD Kongo menganggap bahwa konflik yang terjadi di Dongo selama ini hanya sebagai perselisihan antar etnis yang bisa diselesaikan oleh pemerintah lokal (Sanguma, 2012). Namun, ketika kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik antar etnis mulai mengancam keamanan negara, pemerintah RD Kongo langsung bertindak. Presiden mengirim pasukan militer nasional negara RD Kongo ke Dongo, mencegah perluasan aksi gerakan Odjani, dan menangkap Odjani dan beberapa anggota gerakannya.

Tahun 2010, pemerintah mulai melakukan proses rekonsiliasi konflik di Dongo. Pemerintah mengirim intelijen negara untuk mendapatkan informasi dan juga mengirim komandan pasukan militer RD Kongo. Pemerintah juga bekerjasama

dengan PBB dan organisasi *Search for Common Ground* (SFCG) untuk mempertemukan dan melaksanakan dialog perdamaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik. PBB mengirim perwakilan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dan *United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo* (MONUC) untuk menyediakan transportasi dan keamanan demi kelancaran proses rekonsiliasi. Sementara itu, organisasi internasional SFCG terlibat dalam cara-cara yang kreatif untuk memperdamaikan kedua komunitas yang berkonflik, dan komunitas lainnya yang terkena dampak konflik Dongo melalui media, komunitas, dan dialog. Organisasi SFCG adalah organisasi yang telah bekerja melakukan transformasi konflik di RD Kongo sejak tahun 2001.

Pada tanggal 25 Juni 2010, proses rekonsiliasi di Dongo menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai antar etnis yang berkonflik. Tahun berikutnya, pemerintah, PBB, dan organisasi SFCG berhasil mempertemukan perwakilan desa Enyele dan desa Munzaya untuk melakukan dialog perdamaian. Tepat pada tanggal 31 Maret 2011, kedua desa ini menandatangani perjanjian kesepakatan damai yang mengacu kembali kepada perjanjian antara Dobula dan Kpoluku, leluhur kedua desa. Penandatanganan kesepakatan damai baik yang terjadi di Dongo, maupun di desa Enyele dan desa Munzaya menandakan bahwa konflik telah berakhir secara resmi.

Penandatanganan perjanjian perdamaian tidak menjamin bahwa kondisi wilayah dan masyarakat di Dongo berada dalam situasi yang benar-benar damai. Hubungan konfliktual khususnya dalam masyarakat pasca konflik masih sangat tinggi. Oleh karena itu upaya pembangunan perdamaian masih terus dilakukan, khususnya oleh organisasi SFCG. SFCG mendirikan kantor cabangnya di Dongo dan mulai menjalankan misinya untuk mentransformasi konflik Dongo tetap dengan menggunakan tiga cara utamanya, yaitu media, dialog, dan komunitas.

4.2 Upaya Transformasi Konflik oleh *Search for Common Ground Organization* terhadap konflik Dongo

Organisasi SFCG didirikan di Kinsasha, ibukota Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) pada tahun 2001. Organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh mantan staf pemerintahan Amerika Serikat bernama John Marks di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan SFCG adalah untuk mentransformasi

cara dunia memandang konflik dari pendekatan permusuhan ke penyelesaian masalah yang kooperatif.

Dengan pemerintahan baru yang dipimpin Joseph Kabila, negara RD Kongo semakin terbuka dengan komunitas internasional dan semakin bebas membangun organisasi non-profit. Sesuai dengan peraturan umum No. 004 pasal 37 tahun 2001, negara menjamin kebebasan berorganisasi bagi siapapun termasuk pihak asing untuk berkontribusi baik dalam pembangunan sosial, ekonomi, intelektual, moral, dan spiritual ataupun pendidikan bagi warga negara RD Kongo (Okandjuokonge, 2015). Dengan peraturan ini, SFCG dapat beroperasi di wilayah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah. Salah satunya kantor cabang yang didirikan di Dongo pada tahun 2010 untuk bekerja lebih dekat dengan masyarakat Dongo dan sekitarnya.

Peresmian kantor cabang SFCG di Dongo pada tahun 2010 meningkatkan upaya organisasi untuk melakukan transformasi konflik di wilayah yang masih rentan ini. Dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap konflik dari yang melihat konflik sebagai suatu peristiwa yang bersifat merusak menjadi melihat konflik sebagai suatu peristiwa yang membangun, SFCG menggunakan pendidikan perdamaian sebagai sarana untuk mencapai hal tersebut. Penulis menganalisisnya dengan melihat tiga tipe pendidikan perdamaian menurut Ian Harris (2004), yaitu *human right education*, *development education*, dan *conflict resolution education*. Ketika tiga tipe pendidikan perdamaian ini diterapkan, penulis kemudian melihat transformasi konflik yang terjadi sesuai dengan empat dimensi perubahan dalam transformasi konflik. Empat dimensi tersebut adalah dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi kultural.

Tidak setiap tipe pendidikan perdamaian mengalami perubahan dalam seluruh dimensi yang dijelaskan di atas. Tiap tipe pendidikan perdamaian hanya mengalami perubahan dalam satu atau beberapa dimensi yang terkait. Berbagai penerapan tipe pendidikan perdamaian dan dimensi perubahan yang terjadi dalam kasus di Dongo akan dijelaskan penulis melalui tiga cara utama yang dipakai oleh organisasi SFCG. Tiga cara utama itu adalah dialog, komunitas, dan media (sfcg.com).

4.2.1 Dialog

Dialog adalah salah satu cara yang digunakan oleh SFCG untuk menyampaikan pendidikan perdamaian kepada masyarakat yang pernah mengalami konflik. Dengan cara ini, SFCG mempertemukan orang-orang yang mengalami konflik dan kemudian secara

bersama-sama berdiskusi untuk menemukan dan mencapai tujuan bersama mereka. Contoh dialog yang dikembangkan oleh SFCG adalah mediasi, diplomasi non formal, pelatihan-pelatihan penyelesaian konflik, termasuk pelatihan kepekaan konflik, dan berbagai bentuk dialog penyelesaian konflik lainnya. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan pendidikan perdamaian yang membawa perubahan dalam dimensi transformasi konflik melalui dialog dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Upaya Transformasi Konflik SFCG Melalui Dialog

Tipe Pendidikan Perdamaian \ Dimensi Transformasi Konflik	Dimensi Relasional	Dimensi Struktural	Dimensi Kultural
<i>Human Right Education</i>	Dialog	-	Dialog
<i>Conflict Resolution Education</i>	Dialog	Dialog	-

Dalam menjalankan misinya untuk mentransformasi konflik Dongo, SFCG menerapkan upaya pembangunan kepekaan konflik sebagai bentuk pendidikan perdamaian bagi masyarakat Dongo dan desa-desa sekitar (Enyele dan Munzaya). Upaya dalam mengembangkan kepekaan konflik ini dilakukan SFCG dengan cara turut terlibat dalam menganalisis konflik, memberikan berbagai pelatihan dengan prinsip non kekerasan, dan ikut terlibat dalam melatih masyarakat di lapangan secara langsung untuk memastikan semua teori yang diperoleh dapat diterapkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, SFCG juga mengadakan forum yang membawa orang-orang untuk mendiskusikan isu-isu tertentu, dan juga menjadi mediator itu sendiri ketika dibutuhkan (sfcg.com). Semua hal yang dikerjakan SFCG ini termasuk dalam tipe *conflict resolution education* (pendidikan penyelesaian konflik) yang juga menyentuh tipe *human right education* (pendidikan hak asasi manusia).

Pendidikan penyelesaian konflik dapat dilihat dari kerja SFCG dalam menganalisis konflik. SFCG menggunakan pendekatan inovatif untuk membantu masyarakat memahami dinamika konflik dan relasi antar etnis yang terbentuk di wilayah konflik. Pendekatan inovatif yang dimaksud adalah melibatkan kelompok-kelompok yang berkonflik, melakukan wawancara, dan juga melakukan berbagai penelitian (sfcg.com). Dalam proses rekonsiliasi konflik di Dongo dan dua desa di sekitar Dongo yaitu desa Enyele dan desa Munzaya pada tahun 2010, para fasilitator dari SFCG bertemu dengan pemimpin lokal dan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan wawancara

yang mendalam. Di Dongo, para fasilitator SFCG bekerjasama dengan pemerintah RD Kongo dan PBB bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari setiap etnis (Lobala, Boba, Munzombo, Ngbaka, Ngbandi, Ngombe, Bomboli, Bamwe, Bendere, Bozaba. Dan Baka.), mendengarkan dinamika konflik dari masing-masing etnis dan menganalisis hubungan yang tercipta antara satu etnis dengan etnis lainnya (Sanguma, 2012).

Setelah melakukan analisis konflik melalui wawancara dan penelitian, SFCG bekerjasama dengan PBB dan tentara nasional RD Kongo mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan menciptakan forum diskusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Dongo. Hal inilah yang terkait dengan penerapan pendidikan tentang hak asasi manusia. Di Dongo, berbagai perwakilan etnis yang telah diwawancara sebelumnya dipertemukan dan berdiskusi tentang segala keluhan dan kesalahpahaman yang dialami oleh masing-masing pihak. Ketika salah satu pihak diberikan kesempatan mengungkapkan pemahamannya mengenai konflik dan berbagai keluhan yang dialami, pihak yang lain ditugaskan untuk mendengarkan. Metode ini melatih masing-masing pihak untuk saling menerima, memahami dan menghargai hak asasi orang lain. SFCG mendorong pihak-pihak ini untuk mencapai tujuan bersama mereka yaitu perdamaian. Komunikasi, transparansi, dan partisipasi lokal memang merupakan tiga aturan yang penting dalam proyek kepekaan konflik (sfcg.com).

Hal lainnya namun berkaitan yang dilakukan oleh SFCG dalam menerapkan pendidikan penyelesaian konflik adalah mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang bekerja pada lembaga-lembaga pelayanan sosial. Lembaga yang dimaksud meliputi lembaga kepolisian, lembaga perlindungan terhadap anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, termasuk lembaga yang menangani kebersihan air dan sanitasi. Lembaga-lembaga ini diajarkan untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik dengan sendirinya. Mereka juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai kondisi di wilayah setempat, sehingga intervensi mereka tidak memicu ketegangan dalam masyarakat. Setelah berbagai pelatihan dilakukan, orang-orang yang dilatih tersebut akan terjun langsung untuk menerapkannya di lapangan. SFCG menemani mereka melakukan praktik secara langsung untuk mendorong mereka menerapkan teori menjadi sebuah tindakan nyata (sfcg.com).

Upaya SFCG dalam memberikan pendidikan perdamaian secara langsung mendukung transformasi konflik di wilayah

Dongo. Berbagai bentuk transformasi konflik dapat dilihat dari upaya SFCG yang menyentuh beberapa dimensi perubahan akibat konflik. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi relasional, dimensi kultural, dan dimensi struktural.

Perubahan dalam dimensi relasional terlihat jelas pada upaya SFCG menciptakan forum diskusi yang mempertemukan berbagai etnis yang berkonflik di Dongo dan dua desa sekitar, yaitu desa Enyele dan desa Munzaya. Pada 25 Juni 2010, para fasilitator yang terdiri dari staf SFCG, PBB, dan pemerintah RD Kongo berhasil melakukan pertemuan selama delapan jam dengan perwakilan-perwakilan dari beberapa etnis di Dongo, mendengarkan argumen-argumen yang disampaikan oleh mereka, dan membicarakan proses kesepakatan damai (Sanguma, 2012). Dorongan SFCG kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menceritakan segala keluhan dan pemahaman yang mereka alami, mengungkap segala bentuk kesalahpahaman yang telah dipercaya sejak lama. Forum diskusi di Dongo dan desa-desa sekitar ini akhirnya dapat menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai antar pihak-pihak yang berkonflik, sekaligus menandakan bahwa konflik telah berakhir secara resmi. Bentuk hubungan yang terpulihkan antara pihak yang berkonflik dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti tarian bersama, olahraga, dan berbagai bentuk kegiatan bersama lainnya (Sanguma, 2012).

Selain dimensi relasional, forum diskusi yang diciptakan oleh SFCG di desa Enyele dan Munzaya berdampak juga pada perubahan yang terjadi dalam dimensi kultural. Awalnya, masing-masing desa memiliki keyakinannya sendiri mengenai cerita perjanjian pembagian wilayah antara leluhur kedua desa, yaitu perjanjian antara Dobula dan Kpoluku. Berkembangnya cerita ini memicu konflik sengketa lahan kedua desa menjadi konflik kekerasan. Masing-masing desa dengan keyakinannya tersebut mengklaim tanah yang disengketakan itu sebagai milik masing-masing pihak. Namun, ketika SFCG mengadakan forum diskusi, perjanjian pembagian lahan oleh Dobula dan Kpoluku akhirnya terungkap. Perjanjian perdamaian akhirnya berhasil dibuat dengan mengacu kembali pada perjanjian yang telah dibuat oleh Dobula dan Kpoluku, leluhur kedua desa tersebut bahwa pihak yang berotoritas atas lahan tambak ikan adalah para keturunan Kpoluku yaitu desa Enyele. Cerita yang menjadi budaya bagi kedua desa ini dijadikan dasar bersama untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Apabila upaya SFCG dalam menciptakan forum diskusi di Dongo dan desa Munzaya serta desa Enyele membawa perubahan pada dimensi relasional dan kultural, upaya SFCG yang membawa perubahan pada dimensi struktural terlihat jelas pada pelatihan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pelayanan sosial. Pelatihan berupa cara menganalisis konflik, cara menyelesaikannya, memahami kebutuhan masyarakat lokal, dan memahami intervensi lembaga yang tidak memicu ketegangan dalam masyarakat, memudahkan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kebutuhan akan keamanan dari lembaga kepolisian dan militer. Tahun 2013, hasil penelitian SFCG menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat sipil Dongo dan desa-desa sekitar terhadap lembaga kepolisian dan militer meningkat sebesar 50% (Coutin & Besant, 2013). Hasil ini menunjukkan kebergantungan masyarakat terhadap perlindungan yang diberikan pihak kepolisian dan militer meningkat. Sebelumnya, masyarakat lebih memilih jalannya sendiri untuk melindungi dan mengamankan dirinya sendiri. Pelatihan yang dibuat SFCG ini mengaktifkan kerja lembaga-lembaga pelayanan sosial untuk memberikan pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat umum.

Dalam pendidikan perdamaian, sarana dialog yang dilakukan oleh SFCG termasuk dalam tipe pendidikan penyelesaian konflik dan pendidikan hak asasi manusia. Upaya SFCG melalui pendidikan perdamaian ini terbukti membawa perubahan dalam dimensi-dimensi transformasi konflik, yaitu dalam dimensi relasional, kultural dan struktural. Dengan demikian, dialog dapat dikatakan sebagai salah satu upaya SFCG dalam mendukung transformasi konflik di Dongo.

4.2.2 Media

Ketika dialog dapat mempengaruhi sebagian orang, media dapat berdampak lebih banyak lagi. SFCG sendiri menggunakan media untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi seluruh masyarakat mengenai akar penyebab konflik kekerasan dan juga cara mengatasi perbedaan (sfcg.com). Contoh-contoh media yang dikembangkan oleh SFCG adalah drama TV, film, program-program radio, video musik, dan lain sebagainya.

Di Dongo, media yang dikembangkan oleh SFCG sebagai upaya transformasi konflik adalah radio dan pemutaran film. SFCG menggunakan dua sarana ini untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat yang pernah mengalami konflik kekerasan. Dalam menerapkan pendidikan perdamaian, dua sarana yang digunakan SFCG

ini termasuk dalam tipe *human right education* (pendidikan hak asasi manusia) dan *development education* (pendidikan pembangunan). Untuk lebih jelasnya, pendidikan perdamaian yang dilakukan SFCG dalam mentransformasi konflik di Dongo melalui radio dan pemutaran film ini akan digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Upaya Transformasi Konflik SFCG melalui Media

Tipe Pendidikan Perdamaian	Dimensi Transformasi Konflik	
	Dimensi Personal	Dimensi Relasional
<i>Human Right Education</i>	Media (Radio & Pemutaran Film)	Media (Radio & Pemutaran Film)
<i>Development Education</i>	Media (Radio)	-

Media pertama yang dikembangkan oleh SFCG di wilayah Dongo adalah radio. Tahun 2010, para anggota SFCG menciptakan stasiun pemancar radio pertama di wilayah ini. Stasiun pemancar radio tersebut dinamakan *Radio Communautaire de Dongo (Racodo)*. Di dalamnya tersedia beberapa saluran radio yang memberikan beragam informasi, khususnya saluran radio SFCG sendiri yang memiliki hampir 30 juta penikmat yang tersebar di seluruh RD Kongo (sfcg.com). Dalam radio SFCG, terdapat program-program yang membahas berbagai isu mengenai pemerintahan yang baik, hubungan militer dan sipil, kondisi pemulangan dan perpindahan para pengungsi, kekerasan etnis, kekerasan seksual dan gender, dan berbagai informasi lainnya. Lebih dari 80 mitra radio yang tersebar di RD Kongo menerima pelatihan, dukungan teknis, dan sekumpulan program-program dari SFCG, termasuk stasiun pemancar radio *Racodo* di Dongo.

SFCG menjadikan radio sebagai sarana utama dalam menyampaikan pendidikan perdamaian, khususnya pendidikan hak asasi manusia. Hal ini dilakukan oleh SFCG dengan menyiarkan langsung kepada masyarakat berbagai bentuk proses perdamaian di Dongo, seperti dialog-dialog perdamaian, wawancara terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik, informasi mengenai kondisi pengungsian, baik mengenai masyarakat yang hidup di pengungsian (*returnees*) ataupun masyarakat yang menetap di daerah asal (*residents*), dan berbagai upaya perdamaian lainnya. Proses perdamaian yang didengar oleh masyarakat ini mengurangi prasangka buruk dan kebencian terhadap pihak lain secara perlahan dan

kemudian membentuk pengetahuan, pemahaman, dan sikap saling menghormati dan peduli satu sama lain. Hal ini terlihat jelas dalam program radio yang membahas kondisi masyarakat pengungsian, baik *returnees* dan *residents*. Informasi yang diperoleh dari program radio tersebut menciptakan pemahaman kepada kedua masyarakat untuk saling menerima dan dapat hidup bersama dengan damai apabila para pengungsi kembali pulang ke rumah mereka.

Selain pendidikan hak asasi manusia, program-program radio SFCG juga termasuk dalam pendidikan pembangunan. Dua kali dalam setiap bulan, SFCG mengundang para ahli dalam bidang hukum, bidang kemanusiaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk berdiskusi membahas isu-isu tertentu. Setiap aspirasi khususnya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dapat disalurkan lewat program radio ini. Tujuannya adalah masyarakat Dongo terbebas dari kekerasan struktural, seperti kemiskinan, korupsi, diskriminasi etnis dominan, serta segala bentuk ketidakadilan lainnya. Namun, upaya SFCG melalui media ini kurang menarik keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa partisipasi warga negara yang demokratis cukup melalui pemilihan umum dan juga memiliki kebebasan dalam berekspresi (Fortune, 2008). Ini merupakan salah satu kesulitan dari media sebagai upaya transformasi konflik.

Walaupun terdapat tantangan bagi media untuk menjadi sarana yang efektif dalam transformasi konflik, akan tetapi media khususnya radio membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam perubahan yang terjadi pada dimensi personal dan dimensi relasional. Perubahan pada dimensi personal dapat dilihat dari perubahan emosi dan persepsi pada masyarakat yang berkonflik. Prasangka-prasangka buruk dalam masyarakat dapat berkurang setelah menerima informasi-informasi melalui siaran radio. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh SFCG yang menyatakan bahwa masyarakat yang hidup di tempat pengungsian dan juga mereka yang tinggal di wilayah asal memahami dan akan meningkatkan sikap saling menghargai satu sama lain, antara *returnees* dan *resident*. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa radio merupakan sumber informasi utama bagi *returnees* ataupun *resident* untuk mengetahui perkembangan pengungsi dan proses pemulangannya (Coutin & Besant, 2013).

Pada tahun 2012, dengan bantuan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), 1500 lebih pengungsi pulang ke rumah mereka dan para pengungsi yang pulang

ini disambut oleh para *residents* dengan tarian tradisional dan berbagai kegiatan lainnya. Terjadinya perubahan dalam dimensi personal ternyata membawa dampak pada perubahan pada dimensi relasional. Berbagai kegiatan penyambutan yang dilakukan oleh *residents* ini dapat dikategorikan sebagai perubahan yang terjadi pada dimensi relasional karena kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman bagi *returnees* dan *residents*. Proses penyambutan ini dipercaya masyarakat sebagai simbol perdamaian. Dari kegiatan bersama ini, pola komunikasi dan interaksi yang awalnya buruk dapat dipulihkan.

Selain radio, upaya transformasi konflik SFCG di Dongo juga dilakukan dengan pemutaran film mengenai kekerasan seksual dan gender. Dongo memang merupakan sebuah wilayah yang jarang terjadi kekerasan seksual dan gender. Namun, proyek ini dilakukan sebagai upaya pencegahan bentuk kekerasan ini. Proyek ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran laki-laki akan perannya dalam menghilangkan kekerasan terhadap perempuan. Pesan film yang disampaikan juga didesain untuk berkontribusi dalam perubahan perilaku laki-laki kepada perempuan menjadi lebih positif dan membangun (Koch & N'kolo, 2011).

Proyek pemutaran film pendek yang dilakukan oleh SFCG termasuk dalam pendidikan mengenai hak asasi manusia karena film tersebut mengangkat tentang hak asasi perempuan. RD Kongo sendiri merupakan negara yang paling berbahaya bagi perempuan di dunia (Koch & N'kolo, 2011). Kekerasan terhadap perempuan begitu tinggi di negara ini. Proyek SFCG yang diberi nama "*Vrai Djo*" yang berarti "Laki-laki Sejati" ini menantang para laki-laki untuk mengubah sikapnya terhadap perempuan dari sikap dan perilaku yang negatif menjadi penuh perhatian dan bertanggungjawab.

Dalam transformasi konflik, perubahan yang terjadi melalui proyek ini termasuk dalam dimensi personal dan relasional. Dimensi personal jelas terlihat pada perubahan dalam diri para laki-laki. Dalam penelitian SFCG pada guru, pemerintah lokal, dan tentara di Dongo, rata-rata menyadari sikap dan perilakunya terhadap perempuan. Mereka sadar untuk menghargai perempuan dengan tidak berdasarkan kecantikan fisik saja, melainkan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya (Koch & N'kolo, 2011). Dengan kesadaran itu, maka terbentuk juga perubahan sikap dan cara berelasi dengan perempuan, khususnya dengan istri mereka. Perubahan sikap inilah yang dikategorikan sebagai perubahan dalam dimensi relasional. Para laki-laki mulai menghargai pilihan-pilihan yang disampaikan oleh istri

mereka. Dari penelitian SFCG setelah pemutaran film, terbukti sikap para suami dalam menghargai pilihan yang dibuat oleh istri mereka mengalami peningkatan (Koch & N'kolo, 2011).

Hal-hal di atas adalah upaya transformasi konflik yang dilakukan SFCG melalui media. SFCG menggunakan radio dan pemutaran film sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan perdamaian di Dongo. Baik radio maupun pemutaran film, perubahan yang terjadi terdapat pada dimensi personal dan dimensi relasional. Kedua media ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mencapai perdamaian yang berkepanjangan di wilayah Dongo.

4.2.3 Komunitas

Upaya terakhir yang dilakukan SFCG dalam menyampaikan pendidikan perdamaian untuk mentransformasi konflik Dongo adalah komunitas. SFCG menyediakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyelesaikan konfliknya sendiri dengan cara mempertemukan kelompok-kelompok, tetangga-tetangga, dan keluarga yang telah terpisah untuk mencari pemahaman bersama (*common ground*) mereka. Contoh-contoh komunitas yang diciptakan oleh SFCG adalah pertandingan sepakbola, *participatory theater*, proyek pertanian bersama, dan lain sebagainya.

Dalam mentransformasi konflik di wilayah Dongo, SFCG mengembangkan program *participatory theater* sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan pendidikan perdamaian pada tingkatan lokal. *Participatory theater* sendiri merupakan sebuah pendekatan yang didalamnya terdapat aktor-aktor yang berinteraksi dengan publik, berdasarkan permasalahan yang nyata (Tshibanda & etc, 2005). Melalui kegiatan ini, masyarakat lokal akan berpartisipasi untuk menyesuaikan, mengubah, atau membenarkan situasi, sikap atau perilaku yang berada dalam pertunjukan.

Berikut ini adalah alur dalam melaksanakan *participatory theater* :

1. Sebelum pertunjukan dimulai, para aktor akan mengumpulkan informasi mengenai isu yang sedang berkembang dalam masyarakat yang hidup di wilayah yang menjadi target.
2. Tim SFCG dan para aktor yang telah dilatih memilih suatu tempat khusus untuk pertunjukan dan menyiapkan panggung pertunjukan.
3. Tim kemudian akan mengumpulkan orang-orang yang hidup disekitar tempat tersebut untuk menonton pertunjukan.
4. Pertunjukan dimulai dan para aktor akan memainkan drama sesuai dengan isu yang berkembang di wilayah tersebut.

Pertunjukan biasanya akan memuncak pada pertengkaran antar aktor yang secara alami menggerakkan respon penonton karena drama yang dimainkan adalah kejadian nyata yang dialami mereka.

5. Hampir diakhir drama mediator akan masuk menghentikan perkelahian dan mulai menanyakan kepada penonton solusi terbaik yang dapat membantu mentransformasi konflik dalam cerita.
6. Penonton kemudian dapat memberikan pandangan mereka satu per satu, bahkan memainkan kembali drama tersebut secara langsung sampai solusi ditemukan.

Participatory theatre ini menjadi cara yang paling mengesankan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyelesaian konflik dalam komunitas. Dengan metode ini, pendidikan perdamaian, khususnya pendidikan penyelesaian konflik dapat tersampaikan dengan menarik. Pendidikan penyelesaian konflik yang dimaksud dapat dilihat dari forum bagi komunitas untuk berdiskusi tentang konflik yang sedang dihadapi dan menemukan solusi mengenai permasalahan yang ada dalam pertunjukan. Penyelesaian masalah dalam kegiatan ini akan mendorong penonton untuk menerapkan apa yang telah disaksikan ke dalam kehidupan mereka pada saat itu.

Pendidikan penyelesaian konflik melalui *participatory theater* ini juga membawa perubahan dalam dimensi transformasi konflik. Dalam kasus konflik Dongo, *participatory theater* membawa perubahan yang jelas pada dimensi personal dan relasional. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan pendidikan penyelesaian konflik yang dilakukan SFCG dalam mentransformasi konflik Dongo melalui komunitas, khususnya *participatory theater* ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Upaya Transformasi Konflik SFCG di Dongo melalui Komunitas

Tipe Pendidikan Perdamaian	Dimensi Transformasi Konflik	
	Dimensi Personal	Dimensi Relasional
<i>Conflict Resolution Education</i>	Komunitas	Komunitas

Dalam transformasi konflik di wilayah Dongo, *participatory theater* membawa pengaruh pada dimensi personal dan juga dimensi relasional. Dimensi personal dapat terlihat pada perubahan-perubahan pola pikir seseorang. Seperti hasil wawancara SFCG kepada salah satu warga Dongo yang pernah menyaksikan *participatory theater*, dirinya

dahulu memiliki konflik memperebutkan rumah yang ditematinya saat ini. Sebenarnya, dirinya tinggal di sebuah rumah yang ditinggalkan kosong oleh orang yang melarikan diri ke tempat pengungsian. Saat orang tersebut (*returnees*) kembali, dirinya sama sekali tidak ingin pindah dari rumah tersebut dan membuat *returnees* ini yang harus meninggalkan rumah tersebut. Tetapi, saat dirinya menghadiri *participatory theater* dengan tema okupasi rumah-rumah para *returnees*, dirinya langsung pulang dan mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah tersebut. Setelah pemahamannya terbentuk melalui *participatory theater*, interaksi dan komunikasi orang tersebut juga mulai berubah. Orang tersebut kemudian mengirim surat yang berisikan undangan kepada pemilik rumah yang sebenarnya untuk kembali pulang ke rumah milik mereka. Surat tersebut dikirimnya sebagai bentuk permintaan maaf dan sikap saling pengertian satu dengan yang lain. dengan kegiatan *participatory theater* ini, banyak orang yang tersentuh untuk mengubah pandangan mereka, mengubah pola interaksi yang telah terbentuk dalam masyarakat yang berkonflik, dan meningkatkan sifat saling pengertian satu dengan yang lain.

Dari penjelasan mengenai ketiga upaya SFCG di atas, terlihat ketiga upaya tersebut termasuk dalam semua tipe pendidikan perdamaian dan juga menyentuh semua dimensi transformasi konflik. Berikut ini tabel rangkuman dari ketiga upaya SFCG.

Tabel 4.4 Upaya Transformasi Konflik SFCG di Dongo

Tipe Pendidikan Perdamaian	Dimensi Transformasi Konflik			
	Dimensi Personal	Dimensi Relasional	Dimensi Struktural	Dimensi Kultural
<i>Human Right Education</i>	Media (Radio & Pemutaran Film)	• Dialog • Media (Radio & Pemutaran Film)	-	Dialog
<i>Development Education</i>	Media (Radio)	-	-	-
<i>Conflict Resolution Education</i>	Komunitas	• Dialog • Komunitas	Dialog	-

Upaya-upaya transformasi konflik yang dijelaskan penulis di atas merupakan cara SFCG dalam memberikan pendidikan perdamaian bagi masyarakat yang hidup di wilayah Dongo. Upaya SFCG ini juga telah membawa perubahan pada keempat dimensi perubahan yang terjadi akibat konflik kekerasan. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural.

Semuanya dilakukan dengan menggunakan tiga alat utamanya yaitu dialog, media, dan komunitas. Menurut Lederach yang dikutip Maise (2003) dalam artikel *Conflict Transformation* mengatakan bahwa transformasi akan memahami konflik sebagai perkembangan dari dan menghasilkan dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural. Dengan demikian, konflik yang terjadi di Dongo, serta upaya yang dilakukan oleh SFCG ini merupakan upaya transformasi konflik. Upaya-upaya ini masih terus dilakukan SFCG untuk mencapai perdamaian positif di wilayah Dongo.

4.3 Perdamaian Positif di Wilayah Dongo

Upaya yang dilakukan SFCG dalam mentransformasi konflik di Dongo mengarahkan konflik pada perdamaian positif. Perdamaian positif menurut Johan Galtung (1990) adalah keadaan tanpa adanya kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung dilihat sebagai sebuah tindakan kekerasan yang muncul pada permukaan, seperti perang, kekerasan struktural dilihat sebagai kekerasan tidak langsung dikarenakan struktur masyarakat yang diarahkan pada suatu tata cara yang menghambat masyarakat untuk berkembang, seperti kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Sedangkan kekerasan kultural merupakan kekerasan yang muncul dari identitas agama, ideologi, bahasa, dan seni termasuk dongeng.

Ketiga kekerasan di atas dapat dijumpai pada konflik Dongo. Kekerasan langsung yang terjadi di Dongo merupakan akibat dari kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan langsung pertama kali terlihat pada kekerasan yang dilakukan oleh warga desa Munzaya dengan cara menembak dan membunuh warga desa Enyele, yang kemudian memicu perkelahian dua desa pada tahun 1956. Konflik kedua desa ini dibiarkan dan tidak diselesaikan, sehingga kekerasan langsung yang paling jelas dan besar terlihat pada pembantaian seluruh etnis non-Lobala oleh kelompok pemberontak Odjani pada tahun 2009.

Kekerasan struktural menjadi pemicu utama terjadinya konflik kekerasan di Dongo. Hal ini terlihat pada diskriminasi etnis Lobala terhadap etnis lainnya yang menciptakan ketidakadilan dan menghambat masyarakat non-Lobala untuk mendapatkan posisi dalam perpolitikan, perekonomian, dan sosial. Hak istimewa yang dimiliki etnis Lobala dari pemerintahan kolonial Belgia terus dipertahankan, walaupun RD Kongo telah menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Kekuasaan yang dimiliki etnis Lobala menghambat masyarakat lain untuk berkembang. Selain itu, kemiskinan, tindakan

korupsi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak yang berotoritas juga menciptakan kondisi wilayah yang sangat rentan terhadap konflik. Oleh karena hal-hal tersebut, pembantaian yang terjadi pada tahun 2009 dapat terjadi.

Selain kekerasan struktural, kekerasan kultural telah menjadi pembedaan terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural terlihat pada cerita-cerita fiksi yang berkembang di antara kedua desa, yaitu desa Enyele dan Munzaya mengenai perjanjian leluhur Dobula dan Kpoluku. Kedua desa menganggap ceritanya yang paling benar. Tanpa adanya dokumen tertulis yang resmi berkaitan dengan lahan, perselisihan terus berlanjut dengan dipicu oleh kepercayaan komunal masing-masing desa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh SFCG dalam mentransformasi konflik di wilayah Dongo ini perlahan membentuk keadaan wilayah tanpa adanya ketiga kekerasan yang dijelaskan di atas. Dalam menangani kekerasan langsung, SFCG bersama dengan aktor-aktor perdamaian lainnya mengadakan proses penyelesaian konflik di Dongo dan wilayah sekitar. Upaya ini menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai di Dongo tahun 2010 dan kesepakatan damai antara desa Enyele dan Munzaya pada tahun 2011. Ini menandakan bahwa konflik kekerasan yang terjadi di Dongo dan di wilayah sekitar berakhir secara resmi.

Sedangkan upaya dalam menghilangkan kekerasan struktural terlihat pada penerapan pendidikan perdamaian melalui dialog dan media. Seperti yang telah dijelaskan penulis dalam sub bab sebelumnya mengenai transformasi konflik melalui dialog, salah satu kegiatan SFCG yang dapat mengurangi kekerasan struktural adalah pelatihan penyelesaian konflik bagi lembaga-lembaga pelayanan sosial. Tahun 2013, hasil penelitian SFCG menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat sipil Dongo dan desa-desa sekitar terhadap lembaga kepolisian dan militer meningkat sebesar 50% (Coutin & Besant, 2013). Masyarakat mulai memahami bahwa lembaga kepolisian dan militer adalah pihak yang wajib menangani keamanan dan dapat menyediakan perlindungan bagi masyarakat sipil. Upaya ini membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat yang sebelumnya kurang mempercayai pihak-pihak yang berotoritas dan cenderung bertindak atas dasar pemikiran diri sendiri. Selain itu, upaya SFCG lain yang dapat mengurangi kekerasan struktural adalah pendidikan perdamaian melalui media. Dalam program radio SFCG, beberapa ahli dalam bidang tertentu, juga pemerintah, dan masyarakat sipil sering diundang untuk

berdiskusi bersama membahas berbagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti diskriminasi, kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Hal itu kemudian akan mengundang respon masyarakat untuk menyuarkan aspirasinya secara langsung. Namun, metode ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kemiskinan, korupsi, ataupun diskriminasi etnis dominan dalam perpolitikan, ekonomi, dan sosial. Bentuk-bentuk kekerasan struktural tersebut masih cukup tinggi di wilayah Dongo.

Untuk mencapai perdamaian positif, kekerasan kultural yang terjadi di wilayah Dongo juga harus diatasi. SFCG mempertemukan kedua pihak yang berkonflik, menggunakan dialog sebagai wadah untuk menganalisis penyebab kekerasan kultural, dan kemudian seluruh pihak mulai menemukan jalan cerita yang sebenarnya. Akhirnya, perjanjian wilayah antara Dobula dan Kpoluku yang benar dipakai untuk menjadi dasar perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan antara desa Enyele dan desa Munzaya. Perjanjian yang dibuat pada tahun 2011 itu mengacu pada perjanjian semula yang menyatakan bahwa Dobula dan kaum keluarganya (desa Munzaya) mendapat otoritas mengakses hutan untuk bertani dan Kpoluku beserta desa Enyele secara keseluruhan yang mendapat otoritas terhadap kolam-kolam tambak ikan termasuk tambak ikan yang disengketakan Sejak perjanjian antara Dobula dan Kpoluku terungkap, kedua desa bersepakat untuk hidup dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Perdamaian positif memang belum sepenuhnya tercapai di wilayah Dongo. Hal ini dikarenakan perdamaian sendiri adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Perdamaian tidak hanya sekadar mengakhiri atau mereduksi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, namun lebih kepada upaya untuk memahami cara mencegah konflik agar tidak terulang kembali (Grewal, 2003). Upaya-upaya yang dilakukan oleh SFCG di wilayah Dongo ini merupakan upaya-upaya memperlengkapi masyarakat dengan pendidikan perdamaian agar konflik tidak terulang kembali dan perdamaian terus terjadi di wilayah Dongo. Hal ini terus dilakukan SFCG hingga tahun 2013 dan masih terus berlanjut.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik berskala kecil di suatu wilayah dapat menjadi konflik kekerasan yang mengancam keamanan negara. Konflik kekerasan yang terjadi di wilayah Dongo, Provinsi Equateur, RD

Kongo ini bermula dari perebutan lahan yang berisikan tambak ikan antara desa Enyele dan Munzaya. Masing-masing pihak memiliki keinginan yang besar untuk memperoleh keuntungan berupa kontrol terhadap lahan yang disengketakan tersebut, sehingga jalan kekerasan harus dipilih oleh kedua desa ini. Konflik kekerasan kedua desa tersebut terus dibiarkan dan semakin meluas hingga melibatkan etnis besar Lobala dan Boba di wilayah Dongo. Etnis Lobala kemudian mendukung desa Enyele dan membentuk sebuah kelompok komunal terorganisir yang menamakan dirinya Gerakan Odjani. Tahun 2009, kelompok ini melakukan aksi pembantaian terhadap seluruh warga non-Lobala di Dongo dan wilayah sekitar, dan kemudian menghasilkan ribuan orang meninggal, ratusan rumah dibakar, dan puluhan ribu orang meninggalkan rumahnya untuk menjadi pengungsi.

Meluasnya konflik di wilayah Dongo ini, menarik perhatian organisasi *Search for Common Ground* (SFCG), yaitu organisasi internasional yang telah menjalankan misi untuk mentransformasi konflik di RD Kongo sejak tahun 2001. Pada fase pembangunan perdamaian pasca konflik, organisasi SFCG menerapkan pendidikan perdamaian sebagai upaya transformasi konflik di wilayah Dongo. SFCG menggunakan tiga cara utama untuk menyampaikan pendidikan perdamaian tersebut; dialog, media, dan komunitas. Analisis yang dijelaskan penulis pada di atas menunjukkan bahwa melalui dialog, pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan penyelesaian konflik dapat tersampaikan dan terjadi perubahan pada dimensi relasional, struktural dan kultural. Begitu juga dengan media yang menjadi sarana untuk menyampaikan pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan pembangunan, yang membawa perubahan pada dimensi personal dan relasional. Sedangkan komunitas, khususnya *participatory theater* menjadi sarana yang menarik untuk menyampaikan pendidikan penyelesaian konflik dan membawa perubahan pada dimensi personal dan relasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dialog, media, dan komunitas merupakan proses dalam mempromosikan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai hingga sampai pada perubahan perilaku yang memungkinkan orang melakukan pencegahan konflik dan kekerasan, memecahkan konflik dengan cara damai, dan menciptakan kondisi yang kondusif terhadap perdamaian bagi diri sendiri maupun dengan orang lain. Selain itu, dialog, media, dan komunitas juga membawa perubahan pada

dimensi-dimensi perubahan dalam transformasi konflik.

Perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah Dongo ini membuka pintu bagi terciptanya perdamaian positif. Menurut Grewal (2003), perdamaian itu sendiri tidak hanya sekadar mengakhiri atau mereduksi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, namun lebih kepada upaya untuk memahami cara mencegah konflik agar tidak terulang kembali. Manusia harus belajar bersepakat dengan konflik dan menyelesaikan konflik dengan tindakan yang tenang dan adil. Hal inilah yang diyakini oleh para tokoh transformasi konflik bahwa hal-hal yang dapat memperpanjang konflik dan mengakibatkan kerusakan harus diubah menjadi sesuatu yang konstruktif.

5.2 Saran

Ada beberapa hal yang dirasa kurang dalam upaya transformasi konflik di wilayah Dongo ini, antara lain:

1. Program kerja yang dilakukan oleh SFCG dalam menerapkan pendidikan pembangunan dirasa kurang. Hal ini yang kemudian mengakibatkan kurangnya perubahan dalam dimensi struktural. SFCG kurang mendorong etnis non-Lobala untuk menyeimbangi partisipasi mereka dalam perpolitikan, perekonomian, dan sosial di Dongo. Padahal, dominasi etnis Lobala merupakan salah satu penyebab utama konflik Dongo.
2. Upaya SFCG dalam mentransformasi konflik di Dongo juga kurang mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang dapat digunakan dalam menangani konflik secara konstruktif. Hal ini yang kemudian membuat kurangnya perubahan yang terjadi dalam dimensi kultural.
3. Dalam mentransformasi konflik di Dongo sangat diperlukan peran-peran dari aktor perdamaian lainnya, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan juga masyarakat sipil. Jadi, perlu untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor perdamaian ini.

Selain hal hal di atas, penulis juga ingin memberikan saran lain kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti upaya transformasi konflik di wilayah-wilayah multi-etnis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Coutin, M., & Besant, R. (2013). *Final evaluation: Supporting the peaceful reintegration of Congolese returnees in the Equateur and South Kivu provinces*

of Democratic Republic of Congo. Goma: Search for Common Ground.

- Fountain, S. (1999). *Peace Education in UNICEF*. New York: UNICEF.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research* , 167-191.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research* , 291-305.
- Grewal, B. S. (2003). *Johan Galtung: positive and negative peace*. Auckland: Auckland University.
- Harris, I. (2004). Peace education theory. *Journal of Peace Education* , 5-20.
- Kester, K. (2010). Education for peace: Content, Form, and Structure: Mobilizing Youth for Civic Engagement. *Peace & Conflict* , 1-10.
- Koch, D.-J., & N'kolo, T. (2011). *Vrai Djo Project*. Kinshasa: sfcg.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Maise, M. (2003, october). *Conflict transformation*. Retrieved july 16, 2014, from Beyond Intractability: <http://www.beyondintractability.org/essay/transformation>
- Miall, h. (2004). *conflict transformation: a multi-dimensional task*. berlin: Berghof Research Center.
- Okandjuokonge, F. (2015). *NGO Law Monitor: Democratic Republic of the Congo (DRC)*. Kinsasha: The International Center for Not-for-Profit Law Organization.
- Sanguma, W. (2012). *Re-evaluating peacebuilding in the Democratic Republic of Congo: a case stud in dongo*. San francisco: University of San Francisco.
- SFCG. (2013). *Multi Year Vision 2013-2018*. Kinshasa: SFCG.
- SFCG. (2004). *Search for common ground in the Democratic Republic of Congo Programme Overview*. Kinsasha: SFCG.
- SFCG. (n.d.). *sfcg*. Retrieved 1 10, 2014, from [sfcg: https://www.sfcg.org/](https://www.sfcg.org/)
- Tshibanda, D., & etc. (2005). *Participatory theatre for conflict transformation: Training manual*. Kinshasa: Search for Common Ground.